

PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2012-2015

Oleh :

Kodrat Alam – 14010112130136

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H. Soedarto. SH, Tembalang, Semarang. Kode Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id>/Email : fisip@undip.ac.id

Abstrak

Pariwisata merupakan sebuah industri jasa yang digunakan sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Pekalongan mempunyai potensi pariwisata khususnya pariwisata alam. Letak Kabupaten Pekalongan yang berada jalur Pantura membuatnya mudah dijangkau sekaligus berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan deretan pegunungan menjadikan kabupaten ini mempunyai pesona alam pantai dan pegunungan yang indah. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengelolaan pariwisata yang baik Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif, yang dimaksudkan untuk menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena dalam penelitian secara detail. Sumber data berasal dari data primer maupun data sekunder. Penetapan informan dilakukan dengan teknik *purposive* sampling Dinas terkait dan beberapa lokasi destinasi wisata. Pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Banyaknya obyek wisata yang ada memerlukan strategi pengembangan potensi pariwisata dari semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan andil dari masyarakat sekitar.

Hasil penelitian menemukan bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki banyak potensi pariwisata alam yang ada di Kabupaten Pekalongan. Hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan pariwisata meliputi terbatasnya sarana dan prasarana penunjang serta kurangnya kerjasama yang melibatkan sektor swasta maupun masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata alam di Kabupaten Pekalongan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Kerjasama dan Pariwisata

MANAGEMENT OF POTENTIAL NATURE TOURISM PEKALONGAN REGENCY YEAR 2012-2015

Abstract

Tourism is a service industry that is used as one of the sectors that can increase revenue domestic income. Pekalongan regency has the potential of tourism, especially eco-tourism. Location Regency Pekalongan near the northern coast line makes it easy to reach at the same time directly adjacent to the Java Sea and the mountain range makes this district has a natural charm of beaches and beautiful mountains. In this regard it is necessary to good tourism management of Youth, Sport and Tourism Pekalongan.

This type of research is descriptive qualitative analytical approach, which is intended to present an overview of the situation or phenomenon in the study in detail. Source of data derived from primary data and secondary data. Determination of informants by using purposive sampling relevant Department and several locations of tourist destinations. The collection of data, researchers used three (3) methods, the method of interview, observation and document study. The number of existing attractions strategy requires the development of the tourism potential of all stakeholders such as government, private sector and share of the local community.

The study found that Pekalongan has many natural tourism potential in Pekalongan. Barriers are found in tourism management include the limited facilities and infrastructure and the lack of cooperation involving the public and private sector to develop nature tourism potential in Pekalongan Regency.

Keywords: Management, Cooperation and Tourism

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sebuah industri jasa yang digunakan sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Pekalongan mempunyai potensi pariwisata khususnya pariwisata alam. Letak Kabupaten Pekalongan yang berada jalur Pantura membuatnya mudah dijangkau sekaligus berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan deretan pegunungan menjadikan kabupaten ini mempunyai pesona alam pantai dan pegunungan yang indah. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengelolaan pariwisata yang baik Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan potensi pariwisata alam oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimanakah relasi antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Pekalongan?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan potensi pariwisata alam oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui relasi antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan potensi pariwisata alam Kabupaten Pekalongan.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

1 Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu pemerinthan pada khususnya.

Manfaat Praktis

1 Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan strategi pengembangan potensi pariwisata Pemerintah Kabupaten Pekalongan

2 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber saran bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan di dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada sektor Pariwisata.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Kepariwisataaan

Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

2.2. Strategi Kepariwisataaan Daerah

Berbagai potensi wisata yang dimiliki oleh daerah wisata di tanah air, baik di daerah yang sudah maju maupun yang kurang berkembang kepariwisataanya adalah modal dasar pengembangan kepariwisataan Indonesia. Namun, mengandalkan kekayaan alam, budaya dan kesenian saja belum cukup untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan, diperlukan langkah strategis untuk memasarkan dan merancang pola pengembangan potensi pariwisata yang sesuai dengan karakter daerah setempat. Bidang kepariwisataan itu sendiri

memerlukan adanya strategi pengembangan yang andal dan tepat sasaran yang memang pada orientasinya bertujuan untuk memajukan kepariwisataan di daerah kurang berkembang.

a. Konsep Kemitraan

Ada beberapa pengertian berbeda tapi dengan maksud yang sama tentang kerjasama, beberapa diantaranya diungkapkan oleh Musselman dan Hughes (1964) “*an association of two or more persons to carry on as co- owners of a bussines for profit*” dan diterjemahkan oleh Alma (1993:56) *Partnership* adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Ada dua macam bentuk *partnership* yaitu *Pertama General partnership. Kedua, Limited partnership*. Sedangkan pendapat menurut Madura (2001:36-37) mendefinisikan Kerjasama sebagai bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama, membagi laba atau rugi daripada bisnisnya, mempunyai tanggung jawab tak terbatas.

b. Konsep Public Private Partnership

secara umum konsep *publik-private partnership* ini dapat diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk kontraktual antara pihak publik (federal, lembaga Negara) dengan pihak ketiga (perusahaan swasta) yang bertindak atas dasar mencari keuntungan melalui perjanjian ini. Seluruh kemampuan dan aset dari masing-masing pihak (publik dan swasta) dikombinasikan untuk menghasilkan sebuah fasilitas yang digunakan secara luas oleh masyarakat umum.

2.3. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah sebagai regulator, stabilitator dan fasilitator juga sangat diperlukan sebagai penguasa wilayah untuk menjembatani dan menyeimbangi antara kepentingan pelaku bisnis dan kepentingan masyarakat agar tidak menimbulkan distorsi dan stagnasi. Industri pariwisata sebagai salah satu mata rantai perekonomian dalam pengelolaannya tidak akan terlepas dari ketiga aktor (tripartit) tersebut, namun dalam menjalankan perannya tidak akan terlepas dari kondisi sosial politik dan sosial budaya di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk-bentuk kerjasama antar Pemda dengan swasta dan pemda dengan masyarakat di Kabupaten Pekalongan dalam mengelola industri pariwisata dan untuk memahami peran dari masing-masing pelaku serta untuk mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi pola kerjasama.

a. Pengelolaan Sumber daya Berbasis Komunitas (Community Based Resources Management)

Secara umum *community based development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas merupakan strategi pembangunan masyarakat yang memberi peran dominan kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengelola proses pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya produktif.

b. Pengelolaan Pariwisata melalui konsep Community Based Tourism

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal, dan nilai-nilai sosial daerah tersebut sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pariwisata.

3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1. Potensi Pariwisata Kabupaten Pekalongan

Pembangunan pariwisata merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu serta kualitas sektor pariwisata di suatu daerah tertentu yang berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Pekalongan menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa meliputi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi maupun wisata buatan.

Keberadaan obyek wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan belum secara penuh diminati oleh wisatawan, sehingga pembangunan kepariwisataan merupakan suatu tantangan untuk menuju keberhasilan pengembangan pariwisata, termasuk juga persaingan jasa pariwisata yang belum mampu mendorong Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan *Stakeholder* untuk melakukan investasi.

Dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Kekalongan maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan dituntut untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan dan melakukan perencanaan yang sifatnya strategis, sehingga pariwisata Kabupaten Pekalongan dapat maju dan berkembang. Sampai saat ini Kabupaten Pekalongan hanya dikenal dengan industri batiknya saja tanpa melihat potensi lain Kabupaten Pekalongan yang sebenarnya meyimpan keindahan alam yang besar, oleh karena itu perlu diadakan promosi untuk mengenalkan bahwa Kabupaten Pekalongan dapat menjadi tujuan wisata yang menarik dan sebagai alternatif pariwisata di daerah Jawa Tengah. Didukung dengan lokasi Kabupaten Pekalongan sendiri yang berada di jalur Pantai Utara Jawa yang padat lalu lintas kendaraan dari luar kota.

Pada dasarnya Kabupaten Pekalongan memiliki banyak potensi wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi maupun wisata buatan. Menurut Perda RTRW Kabupaten Pekalongan No. 2 Tahun 2011 di dalamnya mengatur kawasan peruntukan pariwisata. Pada kenyataannya peraturan yang mengatur tentang Daerah Tujuan Wisata belum dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan, tetapi Kabupaten Pekalongan telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan No. 2 Tahun 2011, telah menetapkan 6 kawasan peruntukan pariwisata yaitu, kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan/rekreasi, kawasan wisata belanja, kawasan ekowisata, kawasan wisata budaya dan kawasan wisata religi. Berdasarkan 6 kawasan tersebut dibedakan lagi menurut obyek wisatanya yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

3.2. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Pekalongan memiliki kewenangan dalam mengatur pariwisata di daerahnya. Mengacu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 30 termuat di dalamnya, yaitu:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

3.3. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam keikutsertaannya mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pekalongan merupakan faktor yang sangat penting. Melalui dukungan masyarakat lokal penyelenggaraan kegiatan pengembangan oleh Pemerintah Daerah akan lebih maju dan baik, karena dengan adanya dukungan masyarakat yang turut serta aktif dalam kegiatan memajukan obyek wisata disekitar tempat tinggalnya tentu akan berdampak bagi pengembangan pariwisata. Contohnya, kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat sekitar obyek wisata di kecamatan Petungkriyono untuk menjadi lingkungan sekitarnya agar tetap lestari.

Untuk di Kabupaten Pekalongan, pariwisata yang dianggap memiliki potensi untuk lebih dikembangkan adalah wisata yang dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Inisiatif masyarakat sekitar untuk memanfaatkan daerah lingkungan sekitarnya untuk dijadikan destinasi wisata. Peran aktif masyarakat khususnya melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sampai saat ini totalnya yang terdaftar di Dinporapar sebanyak 10 pokdarwis yang mulai merintis pembangunan obyek wisata dengan membangun infrastruktur pendukung dan berupaya mencari bantuan baik dari pemerintah daerah maupun sektor swasta untuk mengembangkan pariwisata menjadi nilai lebih dari peran masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Peran pokdarwis menjadi penting dari awal inisiatif pemanfaatan potensi wisata alam hingga dikelola menjadi salah satu obyek wisata seperti sekarang. Pokdarwis sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana pendukung wisata seperti *homestay* dan pedagang yang berjualan di sekitar obyek wisata. Peran serta masyarakat di kawasan wisata Kabupaten Pekalongan khususnya di kawasan ekowisata Petungkriyono. Kawasan hutan di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, dipromosikan sebagai "*heart of java*", menyimpan potensi unik dan luar biasa. Keanekaragaman flora dan faunanya sangat tinggi. Beberapa jenis tanaman dan satwa langka yang terancam punah, bahkan paling langka di dunia, masih ditemukan di wilayah hutan seluas 5.300 hektar pada ketinggian 1.294 mdpl ini. Petungkriyono menjadi kawasan wisata yang paling populer terlihat dari banyaknya penginapan berupa *homestay*, warung makan, toko souvenir, pengelola parkir yang baru berdiri di kawasan tersebut berasal dari masyarakat sekitar. Potensi ekonomi dari industri pariwisata dapat memperluas lapangan pekerjaan, banyak pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan pariwisata tersebut. Bahkan, menurut pengamatan peneliti kemajuan pengembangan pariwisata di Petungkriyono dapat dilihat dari banyak berdirinya obyek wisata baru seperti Curug Lawe yang belum genap setahun berdiri, warung-warung sepanjang jalan menuju obyek wisata Petungkriyono, dan penyedia jasa transportasi ke lokasi wisata Petungkriyono pemandu wisata dll. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kehidupan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Walaupun sampai sekarang mayoritas penduduk di daerah sekitar obyek wisata Petungkriyono khususnya bermata pencarian sebagai petani. Terkadang pengelola obyek wisata sendiri masih memiliki pekerjaan pokok selain menjadi pengelola obyek wisata.

3.3 Relasi Pemerintah Daerah dengan Aktor – aktor

Berkaitan dengan relasi dalam pengembangan potensi pariwisata alam pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak lepas dari peran aktor lain dalam pengelolaan pariwisata melainkan juga melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam hal ini adalah masyarakat dan pihak swasta.

3.3.1 Relasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat

Sejauh ini interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu 2012-2015 Pemerintah hanya sebagai regulator yakni mengimplementasikan kebijakan yang berasal dari pusat untuk diterapkan ke bawah (*top-down*). Sehingga masyarakat tidak ikut dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik karena menemui kendala dilapangan yang tidak diantisipasi sebelumnya dalam perumusan kebijakan.

Pemerintah daerah hanya sebatas melakukan pengawasan kepada obyek pariwisata yang baru dan dikelola oleh masyarakat. Serta beberapa kali melakukan penyuluhan tentang bagaimana tata kelola obyek wisata yang baik.

Peran masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya peran yang dijalankan oleh pemerintah. Kondisi masyarakat di suatu wilayah sangat bervariasi, ada masyarakat yang kooperatif dan sangat mudah untuk diajak bekerja sama, namun ada pula masyarakat yang tidak kooperatif, apatis dan acuh terhadap segala program pemerintah.

3.3.2 Relasi Pemerintah Daerah dengan Swasta

Saat ini relasi di antara sektor publik dan privat atau *Public-Private Partnership* telah menjadi standar konsep dalam lingkungan pemerintah lokal. Kemitran memang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan pariwisata melihat bahwa besarnya potensi pariwisata alam yang dimiliki Kabupaten Pekalongan. Semakin kedepan persaingan akan semakin ketat. Setiap daerah akan berlomba-lomba untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk peningkatan pembangunan di daerahnya tidak terkecuali Kabupaten Pekalongan.

Pada kurun waktu penelitian yakni 2012-2015 pemerintah Kabupaten Pekalongan belum mampu untuk melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan pariwisata khususnya pariwisata alam. Ini dikarenakan belum adanya regulasi atau peraturan yang memfasilitasi terjadinya kerjasama dalam pengelolaan pariwisata. belum adanya regulasi menjadi kendala terbesar bagi investor untuk melakukan kerjasama pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun peraturan baik berupa Perda untuk memfasilitasi kerjasama pengelolaan pariwisata untuk mengembangkan potensi pariwisata alam di Kabupaten Pekalongan. Akan tetapi pemerintah terus berupaya untuk menggandeng pihak swasta melalui promosi yang dilakukan oleh Dinporapar diharapkan akan semakin dapat dikenal dan dapat menarik pihak swasta untuk turut serta bekerja sama yaitu berupa bantuan modal.

3.4. Faktor Pendorong Pengembangan Pariwisata

Faktor pendorong pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pekalongan antara lain:

a. Sangat beragamnya pilihan wisata yang ditawarkan mulai dari wisata alam pegunungan, wisata alam pantai wisata belanja dan wisata religi. Obyek wisata di Kabupaten Pekalongan sangat beragam dari mulai wisata pegunungan maupun pantai sehingga menyediakan pilihan bagi wisatawan disesuaikan dengan minatnya. Bagi wisatawan yang menginginkan wisata

pantai bisa berkunjung ke OW Pantai Depok disana menyuguhkan pemandangan asri pantai yang masih alami serta lokasinya yang mudah dijangkau karena terletak di jalan Pantura sehingga dekat dengan sarana penginapan dan tempat makan. Bagi pengunjung yang hobi mendaki gunung terdapat gunung Kendalisodo yang menyediakan fasilitas camping cocok bagi yang ingin menikmati pemandangan asri pegunungan.

b. Budaya masyarakat yang khas di Kabupaten Pekalongan

Keramahan masyarakat sekitar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang tidak ditemui di kota-kota besar. Budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat juga dapat dijadikan potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan karena sudah jarang ditemui di daerah lain. festival / upacara masyarakat desa seperti nyadran, sedekah laut, manten glepung bisa dikemas dan dijadikan daya tarik tersendiri di Kabupaten Pekalongan. Adapula kegiatan megono gunung dalam rangka memeriahkan tradisi syawalan yakni satu minggu setelah hari raya Idul Fitri merupakan wujud dari ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT setelah sebulan lamanya berpuasa dan merayakan hari kemenangan pada hari raya Idul Fitri. Bersamaan dengan acara tradisi syawalan ini pula acara megono gunung dilaksanakan dengan maksud untuk menggali potensi budaya tradisi yang hidup berkembang di masyarakat dan menumbuhkan kesadaran berpariwisata dan berkebudayaan sebagai modal dasar peningkatan percepatan di sektor ekonomi masyarakat. Gunung megono di Linggo Asri merupakan salah satunya tradisi masyarakat disana dapat menyaksikan kegiatan makan bersama nasi megono dan arak-arakan gunung yang terbuat dari nasi megono yang nantinya diperbutkan yang dipercaya dapat mendatangkan berkah. Acara seperti ini berlokasi di obyek wisata yang dikelola pemda dan difasilitasi oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

c. Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar

Adanya sektor pariwisata mendatangkan dampak positif bagi masyarakat sekitar obyek wisata. Semakin maju sektor pariwisata di suatu daerah maka semakin bertambah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut sehingga perekonomian masyarakat sekitar juga akan meningkat. Dapat dilihat bagaimana masyarakat sekitar menikmati hasil dari banyaknya jumlah wisatawan. Banyak kesempatan ekonomi yang tercipta seperti membuat tempat parkir, jasa transportasi, jasa pemandu wisata, warung makan, toko dan lain sebagainya.

Kawasan disekitar obyek wisata menjadi salah satu mata pencarian tersendiri bagi warga sekitar obyek wisata. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah daerah sendiri yang mengupayakan pertumbuhan ekonomi bagi warga masyarakat sekitar obyek wisata.

3.5. Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata

Faktor penghambat pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pekalongan antara lain:

a. Keterbatasan anggaran

Anggaran menjadi faktor yang penting dalam pengembangan pariwisata. Tanpa adanya anggaran yang memadai maka akan terhambatnya suatu kegiatan, khususnya dalam pengembangan pariwisata yang membutuhkan pembangunan fasilitas infrastruktur. Selama ini untuk pariwisata yang dikelola masyarakat sangat bergantung dari pemasukan dari tiket masuk dana swadaya masyarakatnya sendiri dari awal pembentukannya. Tentunya ini yang membuat pengembangan potensi wisata yang ada menjadi terhambat. Sebenarnya masyarakat sendiri telah mengajukan bantuan kepada pemerintah namun untuk sementara belum berjalan dengan baik. Bantuan dari pihak ketiga seperti Corporate Social Responsibility (CSR) swasta sangat membantu pembangunan infrastruktur.

b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berinisiatif sendiri (mandiri).

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan potensi pariwisata dalam upaya mengembangkan pariwisata di daerahnya. Hal ini ditunjukkan dengan jarangny masyarakat yang melakukan kegiatan yang menunjang kegiatan pariwisata. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata berakibat pada sikap masyarakat yang apatis dan merasa tidak memiliki potensi apa-apa di daerahnya yang dapat dijual akibatnya tidak ada inisiatif dari dirinya sendiri untuk mengembangkannya karena memang dia sendiri tidak tahu mana yang harus dikembangkan. Bahkan dari sebagian besar masyarakat yang termasuk anggota kelompok atau forum yang notabene lebih sadar atau mengetahui tentang pariwisata juga bersikap sama yaitu apatis dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah untuk dibuatkan obyek wisata buatan tanpa ada motivasi dari dirinya sendiri untuk mengembangkan budaya daerahnya untuk ditampilkan pada wisatawan

c. Obyek wisata termasuk daerah yang rawan bencana

Jarangnya masyarakat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Pekalongan dari hasil pengamatan di lapangan dapat disebutkan sebagai berikut yaitu masyarakat belum melakukan kegiatan konservasi lingkungan. Masyarakat sebagian besar belum menanam tanaman keras pada lahan pertanian yang miring begitu juga untuk tanah dengan kemiringan lebih dari 40° masih banyak yang belum ditanami tanaman keras. Selain itu untuk mendukung gerakan rehabilitasi tanah dan lahan masyarakat belum melakukan pembibitan tanaman keras sendiri, selama ini hanya mengantungkan bantuan bibit dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan. Hal ini sangat berpotensi mengakibatkan tanah longsor yang memang sering terjadi di daerah pegunungan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga masih sangat minim dalam menyediakan fasilitas tanggap bencana di daerah rawan seperti Petungkriyono.

Konservasi atau pelestarian lingkungan masyarakat Pekalongan khususnya di daerah pegunungan sekitar ekowisata Petungkriyono yang belum berperan serta, hal ini terlihat dengan masih seringnya terjadi erosi pada musim hujan di daerah menuju Kecamatan Petungkriyono kerap kali terjadi tanah longsor dan menutup akses jalan, terjadinya alih fungsi lahan hutan yang termasuk zona penyangga yang dijadikan lahan pertanian dan belum ditanamnya tanaman keras pada tanah-tanah yang miring dan pada lahan pertaniannya yang miring di sela-sela tanaman sayuran.

d. Infrastruktur / sarana dan prasarana yang perlu perbaikan

Kondisi jalan yang rusak dan belum ada transportasi yang khusus menuju obyek wisata serta belum bisa dijangkau dengan angkutan umum sehingga wisatawan yang hendak menuju obyek wisata harus menggunakan kendaraan pribadi baik mobil atau sepeda motor atau menggunakan mobil bak terbuka pengangkut sayur.

4. KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pariwisata juga menyumbangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata. Kabupaten Pekalongan sendiri memiliki potensi kepariwisataan alam besar yang terdiri dari obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dan yang dikelola oleh masyarakat.

Dalam penelitian mengenai “Pengelolaan Pariwisata Alam Kabupaten Pekalongan 2012-2015” berdasarkan hasil yang telah dicapai pada penelitian ini terkait dengan pengelolaan potensi pariwisata alam di Kabupaten Pekalongan dapat ditarik kesimpulan :

1. Pengelolaan pariwisata Kabupaten Pekalongan yang meliputi perencanaan dan implementasi. Perencanaan telah didukung dokumen perencanaan yang cukup baik, namun masih perlu perencanaan yang lebih komprehensif dan lengkap sehingga arahan pembangunan pariwisata dapat lebih efektif dan efisien. Implementasi program pariwisata di Kabupaten Pekalongan dari segi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Pekalongan ditujukan pada kawasan destinasi baik yang dikelola pemerintah dan yang dikelola masyarakat dengan melengkapi sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan fasilitas bagi wisatawan.

2. Partisipasi masyarakat secara umum yang masih kurang maksimal karena tingkatan partisipasi masih dalam tingkatan partisipasi semu dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Masyarakat tidak diikutsertakan dalam perencanaan program kebijakan pengelolaan pariwisata. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari minimnya peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) disebabkan terbatasnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai maupun sosialisasi yang tidak menyentuh masyarakat membuat peran masyarakat masih belum optimal terbukti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program pengelolaan pariwisata pemerintah daerah.

3. Kerjasama atau kemitraan antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan sektor swasta masih belum maksimal karena tidak adanya komitmen atau perjanjian tertulis yang mengatur tentang kemitraan secara khusus menyebabkan pelaksanaan kerjasama belum berjalan optimal. Kemitraan didasarkan pada hubungan timbal balik dan kepercayaan antara kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama, salah satunya yaitu peningkatan wisatawan untuk obyek wisata serta peningkatan pendapatan obyek wisata sehingga berimplikasi pada pendapatan asli daerah.

4.2. SARAN

4.2.1 Saran bagi pemerintah

1. Pengelolaan potensi pariwisata alam Pemerintah Kabupaten Pekalongan hendaknya mengoptimalkan potensi alam yang ada pada setiap obyek wisata di Kabupaten Pekalongan khususnya yang masih baru dan memerlukan pengembangan yang signifikan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Memperbaiki fasilitas yang masih kurang terutama untuk aksesibilitas menuju obyek wisata.

2. Pemberdayaan masyarakat, antara lain dengan : Penyuluhan dan pembinaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), pembinaan pengembangan usaha di bidang pariwisata seperti *homestay*, rumah makan dan toko cinderamata. Perlu adanya dukungan dan partisipasi dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pekalongan baik dari pihak masyarakat sekitar objek wisata, pengelola, pemerintah Kabupaten dan Propinsi. Meningkatkan peran Kelompok

Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk ikut serta dalam program pengelolaan potensi pariwisata alam di daerahnya. Tidak hanya sebatas dukungan tetapi juga peran pokdarwis sebagai inisiator pengembangan pariwisata dari awal perencanaan hingga pengelolaan obyek wisata tersebut.

3. Membuat peraturan daerah untuk meregulasi tentang pengelolaan kepariwisataan. Secara formal belum ada peraturan yang mengatur khusus mengenai pariwisata di Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya peraturan daerah tentunya akan ada aturan yang mengikat dan lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pariwisata sekaligus meminimalisir gesekan kewenangan yang saling tumpang tindih antar instansi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penyusunan dokumen perencanaan pariwisata yang dapat dipadukan dan menjadi bahan masukan penyusunan RTRW Kabupaten Pekalongan dengan memperhatikan warisan sejarah dan kondisi lingkungan alam sekitar. Pengelola maupun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata hendaknya menjalin kerja sama dengan pihak swasta dibidang pariwisata untuk pengembangan obyek wisata seperti *tour travel*, dan hotel. Perjalanan wisata *one day tour* merupakan salah satu alternatif cara untuk membantu mempromosikan berbagai Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan sehingga terciptanya sinergitas antara obyek wisata yang satu dengan obyek wisata yang lain, sehingga memudahkan bagi para pengunjung untuk mencapai obyek wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan.

4.2.2 Saran untuk masyarakat

1. Peran aktif masyarakat sekitar obyek wisata diharapkan berpartisipasi dalam memajukan pariwisata di daerahnya melalui memberikan masukan kepada pemerintah serta mengikuti sosialisasi dan pelatihan keterampilan khususnya yang menunjang peningkatan kualitas pariwisata yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas terkait agar dapat diakomodasi dan dapat meningkatkan pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Pekalongan serta dapat bekerja sama dalam mempromosikan dan mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Pekalongan.

2. Masyarakat diharapkan menjaga kelestarian alam yang ada di lingkungan sekitarnya melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam secara arif dengan tidak merusak ekosistem alami yang ada di sekitarnya. Masyarakat dapat menjadikan pengembangan pariwisata sebagai sarana untuk mengenalkan budaya lokal ke wisatawan sekaligus meningkatkan kehidupan ekonomi di daerah tersebut.

Tinjauan Pustaka:

- A.J, Muljadi. 2009. Kepariwisata dan Perjalanan. Jakarta: Rajawali Pres.
- Burhan, Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana.
- David, Fred R.1999 Strategic Management: Manajemen Strategis Jakarta : Salemba Empat.
- Effendi, Sofian dan Masri Singarimbun. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ESD
- Fakih, Mansour. 2008. Perencanaan Strategis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. Manajemen Strategis. Andi. Yogyakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lituhayu, Heri. 2011. Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pati. Universitas Diponegoro
- Nurhidayati, Sri Endah. Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Surabaya : Airlangga press.
- Pendit, Nyoman S. 2003. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahutami, Angelina Ika. 2001. Public-Private Partnership: Suatu Solusi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Berbasis Kompetensi. Semarang: Jurnal Ekonomi
- Soetomo.2008.Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarto,Slamet, 1994. Peran Serta Masyarakat dalam Peletarian Peninggalan Sejarah di Jawa Tengah Ditinjau dari Usia dan Sosial Ekonomi. Tesis Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta.
- Swastha, Basu dan Irawan. 2008. Menejemen Pemasaran Modern.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Perencanaan Pembangunan. Haji Masagung Jakarta
- Veitzel Rivai, 2000. Partisipasi Pengaruh Angkutan Darat dalam Memelihara Lingkungan. Jurnal Manajemen Transportasi Vol.01 No.05. Oktober 2000. Sekolah Tinggi Trisakti Jakarta.
- Wahab, Salah. 2003. Menejemen Kepariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita
- Winarno, Surakhmad. 1984. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik. Bandung: Tarsito
- Warpani P. Suwarjoko, Warpani P. Indira.2007. Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah, ITB Bandung.
- Yoeti, Oka, A. 1997. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta, Pradaya Pratama.
- Yuanike. 2003. Kajian pengembangan ekowisata mangrove dan partisipasi masyarakat di kawasan Nusa Lembongan, Bali. Tesis. Bogor : Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Undang-Undang:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pada BAB 1 Ketentuan Umum Pada pasal 1 Ayat 5
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : PM.37/UM.001/MKP/07 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Rekreasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031
- Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan 2011-2016